



Beban Administrasi Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang

Indryana Widi Ardainty¹, Inaya Aulia Mizan²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

Abstrak

Received: 07 Juni 2024
Revised: 12 Juni 2024
Accepted: 20 Juni 2024

Setelah undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibuat, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjalankan program pemerintahannya secara mandiri. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang adalah Perangkat Daerah yang memiliki banyak peran dan fungsi penting dalam menjalankan tugasnya. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang memiliki beban administrasi yang harus dihadapi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan menurut bahan hukum utama dengan melakukan telaah pendekatan teori, konsepsi, asas-asas hukum, pendekatan peraturan perundang-undangan, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini. Dinas Pekerjaan Umum memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri yang diatur pada Peraturan Bupati Semarang No. 110 Tahun 2021. Dalam mengurangi beban administrasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawabnya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang memiliki program untuk meningkatkan efisiensi penggunaan beban administrasi serta menghemat biaya operasional. Evaluasi Dalam pembuatan administrasi juga sesuai dengan regulasi yang berjalan. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang telah menunjukkan inovasi dalam menghadapi beban administratif yang melibatkan berbagai aspek. Dengan beberapa program untuk meningkatkan efisiensi penggunaan beban administrasi serta menghemat biaya operasional, lembaga ini membuka masa depan yang cerah untuk keberlanjutan yang berkelanjutan di Kabupaten Semarang.

Keywords: *Beban Administrasi, Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Semarang*

(*) Corresponding Author: natasyamizan@students.unnes.ac.id

How to Cite: Ardainty, I., & Mizan, I. (2024). Beban Administrasi Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 301-307. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12650669>

PENDAHULUAN

Setelah undang-undang otonomi daerah dibuat, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan operasi atau program pemerintahannya secara mandiri tanpa bergantung pada negara. Dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan lokal. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk mengatur penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang memiliki banyak peran dan fungsi penting dalam menjalankan tugasnya terkait pembangunan dan

pemeliharaan infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan. Peran dan fungsi DPU termasuk perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi, pembangunan, pengawasan, pengendalian, operasional, pemeliharaan, dan administrasi dinas. Melalui pengelolaan infrastruktur yang baik, Dinas Pekerjaan Umum memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. DPU harus berusaha untuk meningkatkan kinerja, kompetensi, dan penggunaan teknologi dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur serta memastikan pengawasan pekerjaan konstruksi untuk menjaga kualitas dan keterampilan proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu, DPU harus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Berbagai tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) semakin kompleks dan beragam seiring dengan perkembangan pembangunan dan tuntutan masyarakat. Hal ini terlihat dari berbagai tugas dan fungsi yang diemban oleh DPU seperti perencanaan program dan kegiatan, koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, pengawasan usaha konstruksi, pengembangan pasar dan kerja sama konstruksi, dan pelaksanaan administrasi dinas. Peningkatan tugas dan proyek yang semakin kompleks dan beragam ini mempengaruhi beban administratif dalam Dinas Pekerjaan Umum.

Dalam Dinas Pekerjaan Umum, beban administrasi mencakup semua tanggung jawab administratif yang terkait dengan mengelola proyek konstruksi, seperti dokumentasi, mengelola rapat, mengelola anggaran proyek, dan menggunakan keterampilan manajemen waktu untuk memastikan bahwa tim berjalan sesuai jadwal.

Beban administrasi yang baik adalah beban administrasi yang dapat diatur dengan baik dan efisien sehingga tidak mengganggu kinerja dan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Beban administrasi yang berlebihan atau kurang efisien dapat berdampak negatif pada kinerja dan efektivitas Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Beban administrasi yang berlebihan dapat menghambat kinerja pegawai dan memperlambat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat berdampak pada retensi pegawai dan operasional bisnis. Selain itu, beban administrasi yang berlebihan juga dapat berdampak pada profitabilitas perusahaan.

Dinas Pekerjaan Umum dapat mengevaluasi proses administratif yang dapat mengganggu keberlanjutan proyek infrastruktur. Dinas Pekerjaan Umum dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan proyek infrastruktur dengan menemukan dan mengevaluasi proses administratif yang berpotensi memberikan beban yang tidak diperlukan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja tugas dan tanggung jawab dari dinas pekerjaan umum kabupaten semarang?
2. Bagaimana upaya Dinas Pekerjaan Umum Kab. Semarang dapat mengurangi beban administrasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawabnya?

3. Bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi proses administratif yang berpotensi memberikan beban yang tidak perlu bagi keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur?

Tujuan dari penulisan ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang beban administrasi yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang. Beban administrasi ini dapat mencakup kompleksitas tugas, jumlah proyek, serta perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi proses administratif.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan menurut bahan hukum utama dengan melakukan telaah pendekatan teori, konseü, asas-asas hukum, pendekatan peraturan perundang-undangan, serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif ini dikenal dengan kata lain pendekatan kepustakaan, artinya pendekatan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku serta dokumen yang terkait dengan penulisan ini.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada narasumber dalam subjek penelitian ini untuk mendapatkan informasi serta data yang diperlukan dalam penulisan ini sesuai dengan topik penulisan ini. Data sekunder diperoleh berdasarkan pengetahuan serta penelaahan dari karya ilmiah, pandangan ahli, konsep hukum dan doktrin yang berkaitan dengan penulisan ini serta menunjang informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang

Perangkat daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum. Regulasi dan kebijakan di setiap daerah berbeda dan dapat mengubah tugas Dinas Pekerjaan Umum, tetapi umumnya melibatkan beberapa fungsi utama. Beberapa tugas dari Dinas Pekerjaan Umum adalah Perencanaan Infrastruktur, Pengembangan dan Pengawasan Proyek Konstruksi, Pemeliharaan Infrastruktur, Penataan Ruang dan masih banyak lagi sesuai dengan daerah masing - masing dan kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, Dinas Pekerjaan Umum memiliki tanggung jawab strategis untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman, teratur, dan berguna bagi masyarakat di suatu wilayah.

Infrastruktur yang dibutuhkan oleh setiap daerah berbeda tergantung pada kondisi geografis, demografis, dan ekonomisnya. Dengan memiliki Dinas Pekerjaan Umum di tingkat daerah, keputusan tentang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal.

Pada Peraturan Bupati Semarang No. 110 Tahun 2021 dalam hal pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan kawasan permukiman, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Salah satu tugas utama Dinas Pekerjaan Umum adalah membantu menjalankan urusan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan

penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum juga membantu bupati dalam membuat kebijakan, mengatur program, dan memastikan bahwa kegiatan di sektor pekerjaan umum berjalan dengan baik dan terus berlanjut.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum di wilayah Kabupaten Semarang. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor pekerjaan umum di wilayah Kabupaten Semarang. Tugas utama lembaga ini termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai proyek infrastruktur yang merupakan pilar kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang memainkan peran penting dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah. Pada tahap awal yang strategis, organisasi harus mempertimbangkan kebutuhan mendesak dan menentukan wilayah mana yang harus diprioritaskan untuk pembangunan. Selanjutnya, selama tahap pelaksanaan, Dinas Pekerjaan Umum harus memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur dijalankan sesuai dengan rencana. Pada titik ini, koordinasi yang baik dengan kontraktor, pihak terkait, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan proyek berjalan lancar

Selain itu, tugas Dinas Pekerjaan Umum adalah untuk melakukan pengawasan. Pemeriksaan kepatuhan terhadap anggaran dan deadline juga termasuk dalam proses ini. Sistem pengawasan yang baik memungkinkan organisasi untuk dengan cepat menemukan masalah atau risiko yang menghambat proyek.

Dalam pengelolaan aset, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang harus menjaga kualitas infrastruktur yang telah dibangun dengan melakukan pemeliharaan rutin, perbaikan sesuai kebutuhan, dan peningkatan berkelanjutan untuk mengikuti kemajuan teknologi dan standar infrastruktur.

Keterlibatan masyarakat dalam proses juga penting. Untuk memastikan bahwa kebutuhan lokal dipertimbangkan selama perencanaan dan pelaksanaan proyek, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang harus terlibat secara aktif dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat tetapi juga sebagai mitra dalam proses pembangunan dapat meningkatkan keberlanjutan proyek dan memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan warganya.

Dengan menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara menyeluruh, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang diharapkan dapat terus berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Semarang.

Upaya Dinas Pekerjaan Umum Kab. Semarang mengurangi beban administrasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab

Menurut pendapat dari Ibu Annisa Movida Susanti, S.Psi, MM., Subbagian Umum dan Kepegawaian di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang selaku narasumber, Beban Administrasi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang tidak bisa dikurangi, karena beban administrasi sendiri sudah terikat dalam suatu regulasi maka dalam realitanya tidak dapat dikurangi. Walau tidak bisa dikurangi,

terdapat beberapa program untuk meningkatkan efisiensi penggunaan beban administrasi serta menghemat biaya operasional.

Salah satu tanggapan untuk meningkatkan efisiensi dalam tugas dan tanggung jawab terkait beban administrasi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang adalah dengan mengelola *zero growth* yang menjangkau tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Zero growth* atau pertumbuhan nol sendiri merujuk ke situasi dimana tidak terdapatnya pertumbuhan bersih dalam suatu sistem atau ekonomi. Penting mengelola beban administrasi agar efisien karena dalam konteks Dinas Pekerjaan Umum, *zero growth* dapat mencerminkan pembatasan sumber daya keuangan yang tersedia untuk proyek-proyek konstruksi, perbaikan infrastruktur, pemeliharaan fasilitas umum dan layanan publik lainnya.

Untuk menghindari terjadinya *zero growth* penting untuk menerapkan Teknologi Informasi yang berpengaruh bagi masyarakat saat ini. Teknologi Informasi bisa mengarahkan serta mengendalikan bisnis dengan menciptakan struktur yang dapat menghubungkan pemerintah dengan proses teknologi informasi dan sumber daya. penggunaan teknologi ini dalam sistem pemerintahan dikenal dengan *E-Government*. *E-Government* adalah sistem yang mengintegrasikan lembaga pemerintahan serta memberi fasilitas terhadap masyarakat untuk mengakses informasi yang diperlukan.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa semua instansi pemerintah harus menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bentuk integrasi *E-Government*. Penerapan SPBE pada dinas Pekerjaan Umum dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam beban administratif. Pengumpulan, penyimpanan, dan pengaksesan data dengan cepat dengan SPBE memungkinkan pengelolaan data yang lebih terorganisir. Ini mengurangi kebutuhan akan proses manual dan dokumen fisik. Banyak tugas administratif, seperti pembayaran, perizinan, dan pelaporan, dapat diotomatisasi oleh sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini dapat mengurangi kesalahan manusia, meningkatkan kecepatan pemrosesan, dan menghemat waktu dan biaya.

Selain itu untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas beban administrasi di DPU Kabupaten Semarang dapat dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Suatu kebutuhan yang diperlukan dalam regulasi tersebut apabila perlu untuk dibuat maka direalisasikan. Sebaliknya apabila terdapat kebutuhan di luar regulasi yang sudah ditetapkan maka sebisa mungkin tidak direalisasikan untuk mencegah penambahan beban administrasi yang tidak efisien.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta prosedur administratif yang berlaku terdapat sistem pengendalian internal dan program dari inspektorat. Inspektorat sendiri merupakan Perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten yang memiliki fungsi sebagai lembaga internal auditor pemerintah provinsi untuk mengawasi urusan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten memiliki tugas membantu bupati membina serta mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dari Tugas Pembantuan oleh Perangkat daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan staff untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, dalam pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Contoh yang diberikan oleh Ibu Anisa selaku narasumber merupakan kendali mutu bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan harus diverifikasi secara berkala serta adanya laporan setiap bulan yang termuat dalam sistem sehingga memastikan regulasi dan prosedur administratif dipatuhi secara menyeluruh.

Evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dalam proses administratif yang berpotensi memberikan beban yang tidak perlu bagi keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur

Tantangan khusus dalam penanganan administrasi di Dinas Pekerjaan Umum bisa dilihat dengan bertambahnya beban administrasi dengan sumber daya manusianya yang semakin berkurang. Jika terdapat keterbatasan dalam sumber daya manusia, maka pengelolaan proyek tidak berjalan secara efisien, tingkat kesalahan administratif juga meningkat, hal ini menyebabkan penurunan kondisi infrastruktur serta manajemen proyek menjadi tidak efisien.

Solusi agar beban administrasi yang dikeluarkan tidak berlebihan karena kekurangan sumber daya manusia kembali kepada regulasi yang berjalan. Dalam membuat administrasi harus sesuai dengan regulasi yang berjalan dari pelaksanaan penyelenggaraan dari satu kegiatan ke kegiatan lain. Mulai dari bentuk kontrak yang seperti apa, isi dari kontrak tersebut, hal ini mengarah kepada regulasi pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tidak terdapat administrasi yang tidak diperlukan.

Sebagai salah satu evaluasi umum, DPU harus bisa memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasinya. Pada dasarnya pada semua perangkat daerah terdapat suatu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). SiRUP atau lebih dikenal dengan Rancangan umum Pengadaan (RUP) adalah daftar rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Pengguna Anggaran memiliki peranan yang besar dalam proses pengadaan barang/jasa, termasuk menyusun dan menetapkan RUP. RUP juga memberikan informasi terkait perencanaan kegiatan, hingga barang/jasa apa saja yang dibelanjakan di unggah dalam SiRUP.

Merujuk kepada Perpres No.16 tahun 2018 perihal Pengumuman RUP, Pemerintah diwajibkan untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat luas. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan dalam penggunaan dana APBN/APBD agar terjadi transparansi dalam penyelenggaraannya. RUP mulai diumumkan setelah tersedia anggaran dalam DIPA/DPA dan RKA-KL/RKA-DPA dibahas dengan DPR/DPRD. pengumuman RUP dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) berbasis *web based* yang telah dikembangkan oleh LKPP. Pengumuman RUP melalui SiRUP menjadi syarat bagi K/L/PD untuk melakukan lelang (*e-tendering*) menggunakan SPSE. Nah, aplikasi SiRUP inilah yang mempermudah pihak Pengguna Anggaran (PA) ataupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam mengumumkan RUP-nya.

Dalam pelaksanaan realisasi anggaran sendiri, DPU juga harus menggunakan jasa dari masyarakat lokal atau bisa dibilang dengan pihak ketiga. DPU mendapatkan alokasi anggaran bernominal tertentu serta harus digunakan sebaik-baiknya, yang kemudian turun kepada pihak ketiga. Dimana kemudian pihak ketiga lah yang mengerjakan proyek sesuai anggaran yang ada dalam DPU. posisi DPU disini hanyalah sebatas pengguna serta pemilik anggaran.

KESIMPULAN

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang memainkan peran penting dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang menghadapi beberapa masalah dalam mengelola beban administrasi saat membangun infrastruktur yang berkelanjutan. Perangkat daerah ini telah mengambil tindakan yang secara bertahap untuk mengurangi beban administratif yang tidak perlu. Salah satu tanggapan untuk meningkatkan efisiensi dalam tugas dan tanggung jawab terkait beban administrasi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang adalah dengan mengelola *zero growth* yang menjangkau tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Evaluasi proses administratif yang berpotensi memberikan beban yang tidak perlu bagi keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur melalui SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). SiRUP atau lebih dikenal dengan Rancangan umum Pengadaan (RUP) adalah daftar rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang telah menunjukkan inovasi dalam menghadapi beban administratif yang melibatkan berbagai aspek. Dengan beberapa program untuk meningkatkan efisiensi penggunaan beban administrasi serta menghemat biaya operasional, lembaga ini membuka masa depan yang cerah. Program ini tidak hanya menyelesaikan masalah efisiensi saat ini, tetapi juga menanamkan dasar untuk pertumbuhan dan keberlanjutan yang berkelanjutan di Kabupaten Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Undang - Undang / Peraturan

Indonesia, Pasal 33 ayat (4) PP Nomor 18 Tahun 2016

Indonesia, PerBup Semarang No. 110 Tahun 2021

BAB, I., & UMUM, K. Pasal 1-3 (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Jurnal

Nelly, H. (2023). Analisis Anggaran Biaya Operasional Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Perpajakan dan Auditing, Vol 1. No. 1*, Hlm. 36 - 37.

Krisanthi, G. A. T., Sukarsa, I. M., & Bayupati, I. P. A. (2014). Governance audit of application procurement using COBIT framework. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 59(2)*, Hlm. 342-351.

Taqiya, N. A., Mukaromah, S., & Pratama, A. (2020). Analisis Tingkat Kematangan Spbe Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Jawa Timur. *Scan: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, 15(1)*, Hlm. 22-33.

